



BAGIAN ANGGARAN 005.03.11.402017
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG
SATKER
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
SEMESTER I TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN ANGGARAN 2023

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan**

Telp /Fax : (0711) 5723669

Banyuasin - Sumatera Selatan

e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

website : pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk periode Semester I tahun 2022 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalan Balai, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Barang



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP. 19761203 201101 1 005

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	3
III. Kebijakan Akuntansi BMN	4
3.1. Aset Tetap	5
3.1.1. Tanah	5
3.1.2. Gedung dan Bangunan	5
3.1.3. Peralatan dan Mesin	5
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	5
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	5
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	6
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	6
3.2. Persediaan	6
IV. Laporan BMN	7
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	7
4.2. Laporan Barang Milik Negara	7
4.2.1. Aset Tetap	9
4.2.2. Barang Persediaan	9
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	10
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	10
V. Kendala dan Saran	11
5.1. Kendala	11
5.2. Saran	11
VI. Penutup	12

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- E. Laporan Aset Tak Berwujud**
- F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL**
- J. Laporan Kondisi Barang**
- K. Berita Acara IP**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan

dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	0
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(0)
Aset tak Berwujud	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Ekstrakomptabel	0
Total	0

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN SMT I TA 2023 dengan TA 2022.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
SMT I TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SMT12023</i>	<i>TA 2022</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(0)	(0)
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	0	0

4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan dengan jumlah sebesar Rp0 dengan rincian mutasi tambah sebesar Rp0, mutasi kurang sebesar Rp(0).
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 mengalami penambahan dengan jumlah sebesar Rp0 dengan mutasi tambah sebesar Rp0, mutasi kurang sebesar Rp(0) dan penyusutan sebesar Rp(0).
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai dengan jumlah sebesar Rp0 dengan mutasi tambah sebesar Rp0, mutasi kurang sebesar Rp(0) dan penyusutan sebesar Rp(0).
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai dengan jumlah sebesar Rp0 dan penyusutan sebesar Rp(0).
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai dengan jumlah sebesar Rp0.
- f. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 mengalami penambahan dengan jumlah sebesar Rp0 dengan mutasi tambah sebesar Rp0, mutasi kurang sebesar Rp(0).
- g. Nilai Aset tak Berwujud pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai dengan jumlah sebesar Rp 0.
- h. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai dengan jumlah sebesar Rp0 dan penyusutan sebesar Rp(0).

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 mengalami perubahan nilai sehingga menjadi Rp0.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
SMT I 2023 DAN TAHUN 2022*

PERSEDIAAN	SMT I TAHUN 2023	TAHUN 2022
Barang Konsumsi	0	0
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I tahun 2023 tidak mengalami penambahan dengan jumlah sebesar Rp0 dengan mutasi tambah sebesar Rp0, mutasi kurang sebesar Rp(0).

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI PER SEMESTER I TAHUN 2023

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPB</i>	<i>UAKPA</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	0	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Banyak hal kesulitan yang kami alami ketika setiap menghadapi pembuatan laporan semesteran dan tahunan, namun sampai saat ini baik dari tingkat KORWIL SUMATERA SELATAN maupun tingkat BUA belum ada pemantapan tentang tata cara pembuatan laporan yang akurat, baik dan benar.

5.2. SARAN

Harapan kami untuk tingkat KORWIL maupun tingkat BUA ketika menerima Laporan Semesteran dan Tahunan dapat meralat/mengecek isi daripada laporan semesteran tersebut jika ditemukan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian data yang dilaporkan.

Kemudian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para operator, kami sangat berharap kiranya dapat mengadakan bimtek secara teknik praktek penguasaan materi pada Aplikasi SIMAK BMN.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan RI atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023 bisa tetap dipertahankan pada tahun 2023 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

BAGIAN ANGGARAN 005.03.11.402017

SEMESTER I TAHUN 2023

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/ Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2023.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini adalah sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*) dan nilai mutasi bertambah yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selata;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2023

1. Saldo Awal Semester I TA 2023

Nilai BMN saldo awal Semester I Tahun Anggaran 2023 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebesar Rp0 yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp0 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN Semester I TA. 2023 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I per 30 Juni 2023 sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	0	0	0
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0

Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 dan kondisi usang senilai Rp0.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 m² senilai Rp0. Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 m² senilai Rp0.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

1) Alat Besar (3.01)

Tidak ada jenis barang Alat Besar pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2) Alat Angkut (3.02)

Tidak ada jenis barang Alat Angkut pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3) **Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)**

Tidak ada jenis barang Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4) **Alat Pertanian (3.04)**

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

5) **Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)**

Tidak ada jenis barang Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

6) **Alat Studio dan Komunikasi (3.06)**

Tidak ada jenis barang Studio dan Komunikasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

7) **Alat Kedokteran (3.07)**

Tidak ada jenis Alat Kedokteran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

8) **Alat Laboratorium (3.08)**

Tidak ada jenis Alat Laboratorium pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

9) **Alat Persenjataan (3.09)**

Tidak ada jenis Alat Persenjataan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

10) **Komputer (3.10)**

Tidak ada jenis barang Komputer pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

11) **Alat Eksplorasi (3.11)**

Tidak ada jenis Alat Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

12) **Alat Pengeboran (3.12)**

Tidak ada jenis Alat Pengeboran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

13) **Alat Produksi (3.13)**

Tidak ada jenis Alat Produksi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada jenis Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada jenis Alat Keselamatan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

16) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis Alat Peraga pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Tidak ada jenis Peralatan Proses / Produksi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

18) Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada jenis Rambu-rambu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

19) Peralatan Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis Peralatan Olahragai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

20) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Peralatan dan Mesin (3.20)

Tidak ada jenis Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkut	0	0	0
3.	3.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0
6.	3.06 Alat Studio dan Komunikasi	0	0	0
7.	3.07 Alat Kedokteran	0	0	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0
10.	3.10 Komputer	0	0	0
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi	0	0	0

14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses/Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
19.	3.19 Peralatan Olahraga	0	0	0
20.	3.20 Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga pada Peralatan dan Mesin	0	0	0
Total		0	0	0

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

2) Monumen (4.02)

Tidak ada monumen pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3) Menara (4.03)

Tidak ada Menara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Tidak ada Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	0	0	0
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Menara	0	0	0

4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
	Total	0	0	0

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Tidak ada Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2) Bangunan Air (5.02)

Tidak ada Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3) Instalasi (5.03)

Tidak ada Instalasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4) Jaringan (5.04)

Tidak ada Jaringan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
3.	5.03 Instalasi	0	0	0
4.	5.04 Jaringan	0	0	0
	Total	0	0	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Tidak ada Bahan Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Tidak ada Barang Bercorak Kesenian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3) Hewan (6.03)

Tidak ada Hewan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4) Ikan (6.04)

Tidak ada Ikan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

5) Tanaman (6.05)

Tidak ada Tanaman pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

6) Aset Tetap dalam Renovasi (6.04)

Tidak ada Aset Tetap dalam renovasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	0	0	0
2.	6.02 Barang Bercorak kesenian	0	0	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Asep Tetap dalam renovasi	0	0	0
Total		0	0	0

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Dari jumlah Konstruksi dalam pengerjaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Konstruksi dalam pengerjaan dengan nilai sebesar Rp0.

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

2) Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
Total				0

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa Aset Bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp0. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	Aset Tetap						
	Tanah	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
	Gedung dan Bangunan	0		0		0	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah						
	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
	Aset tak Berwujud	0		0		0	
	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0		0		0	
	Total	0		0		0	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	0		0		0	
Gedung dan Bangunan	0		0		0	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
Aset Tetap Lainnya	0					

Aset Lainnya	0	0	0
Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0
Total	0	0	0

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	0	0	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	0	0	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	%.
1	Tahunan TA 2020	0	0	
2	Tahunan TA 2021	0	0	
3	Semester I TA 2022	0	0	

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN	BELUM DITETAPKAN
		STATUS PENGGUNAAN RP.	STATUS PENGGUNAAN RP.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan	Jumlah
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang a. Dikembalikan b. Ditolak c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

C. Pengelolaan BMN Idle

URAIAN	JUMLAH
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
Selesai serah terima kepada pengelola	0

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang
Tidak ada Daftar Barang Hilang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang
Tidak ada Daftar Barang Rusak Berat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

e. BMN berupa barang BPYBDS

Tidak ada BMN berupa barang BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

f. Permasalahan pelaksanaan penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

g. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Penanggungjawab Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2023

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Kuasa Pengguna Barang



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.

NIP. 19761203 201101 1 005

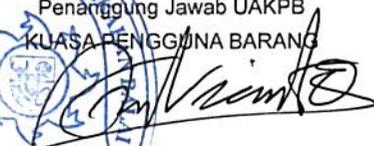
LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS BARANG
MILIK NEGARA

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

NAMA UAKPB : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tanggal : 27/07/2023 12.35.46
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbrmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197612032011011005

LAMPIRAN II

*Laporan Barang
Intrakomptabel*

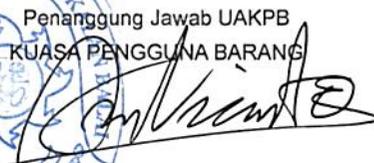
**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM
Tanggal : 27/07/23 8:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197812032011011005



LAMPIRAN III

*LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL*

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 27/07/23 3:54 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197612032011011005



LAMPIRAN IV

*LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan*

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005
UAKPB : 402017

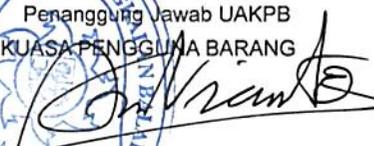
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 27/07/23 12:00 AM

Tanggal : 27/07/23 5:47 AM

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2023	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023
Peranggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197612032011011005



LAMPIRAN V

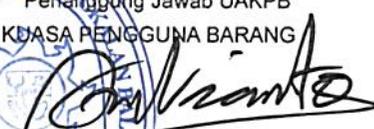
*LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD*

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM
Tanggal : 27/07/23 4:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197512032011011005



LAMPIRAN VI
LAPORAN PERSEDIAAN DAN
BERITA ACARA OPNAME
FISIK



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kel. Kedondong Raye Kec.

Banyuasin III, Kab. Banyuasin

Telp / Fax. (0711) 5723669 Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id

BANYUASIN

BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I TAHUN 2023

Nomor: W6-U10/ 753 /PL.07/VII/2023

Nama Satker : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Kode Satker : 402017
UAPPB-W : Mahkamah Agung Republik Indonesia
UAPPB-E1 : Badan Peradilan Umum
UAPB : Pengadilan Tinggi Palembang

Pada Hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kami yang bertanda Tangan dibawah ini Panitia Opname Fisik :

2. Nama : Rahmat Juniansyah
NIP : 19750620 199403 1 001
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan
3. Nama : Endang Azhari
NIP : 19730903 199303 1 003
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan
4. Nama : Eunike Mayerni Batubara, A.Md.A.B
NIP : 19990522 202203 2 007
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah Melakukan Stock Opname Barang Persediaan Semester I Tahun 2022, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname).

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 27 Juni 2023

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP. 19761203 201101 1 005

TIM STOCK OPNAME PERSEDIAAN,

4. RAHMAT JUNIANSYAH
5. ENDANG AZHARI
6. EUNIKE MAYERNI B, A.Md.A.B

(Rahmat)
(Endang)
(Eunike)

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UAPPB-W : PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2023
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	0
000002	SPIDOL KECIL HITAM	0
000003	PENA JOYKO JK 100	0
000021	PENA BALLINER HITAM	0
000025	PENA KENKO EASY GEL HB	0
000028	PENA BALLINER BIRU	0
000029	PENA GEL TIZO	0
000031	PENA STANDAR AE7	0
000033	PENSIL 2B JOYKO	0
000044	SPIDOL SNOWMAN PERMANEN HITAM	0
000045	PENA KENKO 0,5 MM	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
000001	TINTA STEMPEL MANIS BIRU	0
000002	PAD STAMP HERO	0
000003	TINTA STEMPEL	0
000004	TINTA STEMPEL MANIS UNGU	0
1010301003	Penjepit Kertas	0
000002	BINDER CLIPS 260	0
000003	BINDER CLIPS 107	0
000004	BINDER CLIPS 155	0
000008	BINDER CLIP JOYKO 260	0
000009	BINDER CLIPS 105	0
000010	PAPERCLIPS NO 5	0
1010301004	Penghapus/Korektor	0
000001	TIPE-X JOYKO	0
000002	PENGHAPUS PENSIL JOYKO	0
000003	TIPEX KENKO O1	0
000004	TIPEX ROLL IS 3	0
1010301005	Buku Tulis	0
000029	BUKU EKSPEDISI	0
000030	BUKU FOLIO	0
000033	BK F100 PAPERLINE	0
1010301006	Ordner Dan Map	0
000001	CETAK MAP KAMBING PERKARA PIDANA	0
000005	MAP BIOLA	0
000006	BOXFILES BANTEX	0
000007	ORDNER BANTEX	0
000018	BOXFILE BIRU	0
000020	MAP BIOLA HIJAU	0
000021	MAP BIOLA MERAH	0
000022	MAP PLASTIK JEPIT HIJAU	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2023
000023	MAP PLASTIK JEPIT MERAH	0
1010301007	Penggaris	0
000001	MISTAR BESI 30 CM	0
000002	MISTAR PLASTIK 30 CM	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	0
000001	CUTTER A 300 BASIC	0
000003	CUTTER KENKO L-500	0
1010301010	Alat Perekat	0
000003	LAKBAN BENING	0
000004	LAKBAN HITAM	0
000011	LEM GLUE STICK KENKO 25 GR	0
000012	LEM CAIR 111 POVINAL	0
000013	LAKBAN BENING BESAR	0
000014	DOUBLE TAPE PUTIH	0
000015	LAKBAN COKLAT	0
1010301012	Staples	0
000003	STAPLER KANGARO TRENDY-35	0
000004	STAPLER KANGARO HS-45P	0
000005	STAPLER KANGARO HD 10	0
000006	STAPLES UNTUK JILID 12 N/24 KENKO	0
1010301013	Isi Staples	0
000003	ISI NECIS KANGARO NO. 3	0
000004	ISI NECIS KANGARO NO. 10	0
000005	ISI NECIS 20 MM UNTUK JILID 23/20	0
1010301014	Barang Cetakan	0
000001	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-AI P	0
000002	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BIASA	0
000003	REGISTER PENAHANAN	0
000004	REGISTER PERMOHONAN PERKARA PIDANA BANDING	0
000005	REGISTER PERMOHONAN PERKARA PIDANA KASASI	0
000006	REGISTER PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA	0
000007	REGISTER BARANG BUKTI	0
000008	REGISTER IJIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN	0
000009	REGISTER IJIN PERSETUJUAN PENYITAAAN	0
000010	REGISTER PERMOHONAN GRASI	0
000011	REGISTER PRAPERADILAN	0
000014	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA SINGKAT	0
000017	REGISTER PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA	0
000019	REGISTER INDUK PERKARA PERDATA GUGATAN	0
000020	REGISTER INDUK PERKARA PERDATA PERMOHONAN	0
000021	REGISTER EKSEKUSI	0
000022	REGISTER PENYITAAAN	0
000025	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING KI-A2	0
000026	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PERDATA KASASI KI-A3	0
000027	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI KI-A4	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2023
000028	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN EKSEKUSI KI-A5	0
000029	BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA KI-A7	0
000030	BUKU KEUANGAN BIAYA EKSEKUSI KI-A8	0
000031	BUKU PENERIMA UANG HAK - HAK KEPANITERAAN PNBK KI-A9	0
000032	BUKU KAS BANTU	0
000033	SKUM PENGADILAN	0
000034	AGENDA SIDANG HAKIM PENGADILAN NEGERI	0
000035	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BIASA ANAK	0
000036	REGISTER PERKARA PIDANA ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI	0
000037	REGISTER PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA ANAK	0
000040	REGISTER PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA ANAK	0
000041	REGISTER KESEPAKATAN DIVERSI	0
000042	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA SINGKAT ANAK	0
000043	REGISTER INDUK PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN ANAK	0
000044	REGISTER PENAHANAN ANAK	0
000045	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A1 G	0
000046	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A2	0
000047	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A3	0
000048	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A4	0
000050	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A5	0
000051	BUKU AGENDA SIDANG HAKIM PN	0
000052	BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PN KI-A7	0
000053	BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PN KI-A8	0
000054	BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PN KI-A9	0
000055	REGISTER INDUK PERKARA PERDATA BANDING PN	0
000056	REGISTER INDUK PERKARA PERDATA KASASI PN	0
000057	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BANDING	0
000058	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA KASASI	0
000059	REGISTER PENAHANAN PIDANA	0
000060	REGISTER GRASI PIDANA	0
000061	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA CEPAT	0
000062	REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN ANAK	0
000063	REGISTER TINDAK PIDANA RINGAN	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000002	SIGN HERE 5157	0
000016	GUNTING	0
000018	STABILO	0
000019	PENSIL JOYKO	0
000020	PEMBOLONG KERTAS NO 40 JOYKO	0
000021	SIGN HERE BAZIC 5154	0
000022	STICKY NOTE TF 694 - 4C 1100	0
1010302001	Kertas HVS	0
000001	KERTAS HVS F4 SIDU 70 GSM	0
000003	KERTAS HVS 70GR AONE	0
000004	KERTAS HVS SIDU F4 80 GR	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2023
1010302003	Kertas Cover	0
000001	KERTAS KAMBING MERAH	0
000006	PLASTIK MIKA JILID	0
1010302004	Amplop	0
000003	CETAK AMPLOP CD PN PANGKALAN BALAI	0
000005	CETAK AMPLOP KOP KABINET LOGO PN PANGKALAN BALAI	0
000011	AMPLOP KOP BESAR (UKURAN MAP)	0
000012	AMPLOP KOP BESAR (UKURAN FOLIO)	0
000013	CETAK AMPLOP KOP SEDANG LOGO PN PANGKALAN BALAI	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	0
000001	MIKA ASAHI 0,10 FOLIO	0
000002	KERTAS BUNGKUS COKLAT/KOPI	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	0
000001	TINTA EPSON HITAM 003	0
000009	TINTA EPSON 664 HITAM	0
000010	TINTA EPSON 003 CYAN	0
000011	TINTA EPSON 003 MAGENTA	0
000012	TINTA EPSON 003 YELLOW	0
000015	TINTA CANON 790 C M Y	0
000016	TINTA CANON 790 HITAM	0
000029	TINTA CANON 790 BIRU	0
000030	TINTA CANON 790 MERAH	0
000031	TINTA CANON 790 KUNING	0
000036	TINTA EPSON 664 BIRU	0
000037	TINTA EPSON 664 KUNING	0
000038	TINTA EPSON 664 MERAH	0
000039	CATRIDGE CANON G1010 HITAM	0
000040	CATRIDGE CANON IP2770 HITAM	0
000041	CATRIDGE CANON PIXMA MP287 HITAM 810	0
000042	TINTA DATA PRINT CANON G210 HITAM	0
000043	TINTA DATA PRINT CANON G210 WARNA	0
000044	CATRIDGE 810 ORI	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000001	FLASHDISK 16 GB	0
000002	FLASHDISK 32 GB	0
000005	FLASH DISK 64GB	0
1010304008	CD/DVD Drive	0
000001	CD-R	0
1010304011	CD/DVD	0
000001	CDR GT-PRO	0
1010307006	Atribut	0
000001	BENDERA MAHKAMAH AGUNG	0
000004	KALUNG JABATAN HAKIM PN	0
000008	PALU HAKIM	0
Jumlah per Akun		0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2023
Total Jumlah		0

Keterangan

- 1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- 2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 30-06-2023

Kuasa Pengguna Barang

KUASA PENGGUNA BARANG



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.

197612032001011005

PANGKALAN BALAI, 30-06-2023

Petugas Pengelola Persediaan



EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md.A.B

19990522 2022032007

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
UAPPB-W : PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
KODE UAKPB : 005.03.1100.402017.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	0
	Jumlah	0

Disetujui tanggal : 30-06-2023
Kuasa Pengguna Barang
KUASA PENGGUNA BARANG

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197612032001011005



PANGKALAN BALAI, 30-06-2023
Petugas Pengelola Persediaan



EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md.A.B
19990522 2022032007

LAMPIRAN VII

*LAPORAN POSISI BMN DAN
KEUANGAN PADA NERACA*

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

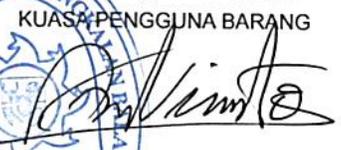
Tgl.Data : 27/07/23 6:00 AM
Tgl.Cetak : 27/07/23 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
	JUMLAH	

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG




ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.

197612032001011005

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

LAMPIRAN IX
BERITA ACARA
REKONSILIASI DENGAN
KPKNL

LAMPIRAN X
LAPORAN KONDISI BARANG

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER JUNI 2023

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE UAKPB : 005.03.1100.402017

Tanggal : 27/07/2023 15.54.31

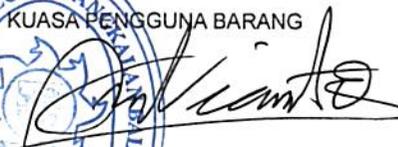
Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah null								

PANGKALAN BALAI, 27 Juli 2023

Pananggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
197512032011011005

LAMPIRAN XI
BERITA ACARA IP